### **BAB 1**

#### **PENDAHULUAN**

## 1.1. Latar Belakang

Setiap orang berhak hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial. Keadaan sehat seseorang tidak hanya terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Hal ini perlu diusahakan setiap pribadi demi tercapainya sumber daya manusia yang efektif dan efisien. Gangguan pada kesehatan dapat mengganggu aktivitas, bahkan dapat menyebabkan terhadap negara terlebih jika terjadi wabah/ pandemi/ kejadian luar biasa lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan serangkaian 1 kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Di dalamnya termasuk fasilitas pelayanan kesehatan disertai segala sumber daya yang diperlukan dalam mencapainya (Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023).

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/ atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dimana salah satunya merupakan Pusat Kesehatan Masyarakat atau biasa disebut Puskesmas demi memperluas jangkauan pelayanan kesehatan untuk masyarakat di suatu wilayah kerja. Menurut Permenkes No. 74 tahun 2016, Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang menyelenggarakan upaya kesehatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Konsep kesatuan upaya kesehatan ini menjadi pedoman dan pegangan bagi semua fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia termasuk Puskesmas.

Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan upaya kesehatan yang berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan harus mendukung mendukung tiga fungsi pokok Puskesmas yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, dan pusat pelayanan kesehatan strata pertama yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan kefarmasian di puskesmas juga bertujuan dalam mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah terkait pengobatan dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Tuntutan pasien dan masyarakat akan peningkatan mutu pelayanan kefarmasian,

mengharuskan adanya perluasan dari paradigma lama yang berorientasi kepada produk (drug oriented) menjadi paradigma baru yang berorientasi pada pasien (patient oriented) filosofi Pelayanan Kefarmasian (Pharmaceutical dengan Care). Dalam penyelenggaraannya, berdasar Permenkes 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permenkes No. 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, Apoteker selaku penanggung jawab dapat dibantu oleh Apoteker, Tenaga Teknis Kefarmasian dan/atau tenaga kesehatan lainnya berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Jika suatu Puskesmas belum memiliki Apoteker sebagai penanggung jawab, penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian dapat dilakukan oleh Tenaga Teknis Kefarmasian secara terbatas di bawah pembinaan dan pengawasan Apoteker yang ditunjuk oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.

Pelayanan kefarmasian di Puskesmas meliputi 2 kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) serta kegiatan pelayanan farmasi klinik yaitu pengkajian dan pelayanan resep, Pelayanan Informasi Obat (PIO), dan monitoring efek samping obat. Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) meliputi perencanaan kebutuhan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, administrasi (pencatatan dan pelaporan) dan pemantauan dan evaluasi, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan. Serangkaian proses pengelolaan ini bertujuan dalam menjamin kelangsungan ketersediaan dan keterjangkauan sediaan farmasi dan BMHP yang efisien, efektif dan rasional, meningkatkan kompetensi/kemampuan tenaga kefarmasian, mewujudkan sistem informasi manajemen, dan melaksanakan pengendalian mutu pelayanan.

Mengingat pentingnya tugas, tanggung jawab, dan fungsi seorang Apoteker di Puskesmas serta tuntutan kemampuan yang harus dimiliki, maka calon apoteker perlu dibekali melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang diselenggarakan oleh Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, melalui kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan pengalaman di dunia kerja, pengetahuan dan pemahaman mengenai peran apoteker di puskesmas didasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PKPA dilaksanakan di Puskesmas Jagir yang terletak di Jalan Bendul Merisi No. I Surabaya, yang dilaksanakan mulai tanggal 8 April sampai 3 Mei 2024.

# 1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

- 1. Mendapatkan pemahaman secara *real* bagi calon apoteker tentang peran, fungsi dan tanggung jawab seorang Apoteker dalam melakukan praktek pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
- 2. Memberikan bekal bagi calon Apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap-perilaku serta wawasan dan pengalaman dalam melakukan praktek pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
- 3. Memberikan gambaran pada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari, juga mengasah analisa maupun *problem-solving* dan melakukan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.

# 1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

- 1. Memahami peran, fungsi dan tanggung jawab seorang Apoteker dalam melakukan praktek pelayanan kefarmasian di Puskesmas secara nyata.
- Mendapatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku profesional baik terhadap masyarakat maupun tenaga kesehatan lain, juga mendapat wawasan maupun pengalaman lebih dalam melakukan praktek pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
- 3. Mengasah proses analisa keadaan maupun *problem-solving* dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.